



Kerangka Kerja Pengukuran Dampak Sosial (Social Impact) Jangka Panjang pada Program Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi

Sri Astuti Iriani¹, Irhas², Yorman³

^{1,2,3}Universitas Bumigora

sriastutiiii14@gmail.com¹

Article History:

Received: 17-01-2025

Revised: 27-01-2025

Accepted: 10-02-2025

Keywords: 3Dampak Sosial, Pengukuran Dampak, Jangka Panjang, Pengabdian Kepada Masyarakat, Evaluasi Program, Teori Perubahan, SROI

Abstract: Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Namun, terdapat sebuah paradoks akuntabilitas: meskipun ribuan kegiatan dilaporkan selesai, dampak sosial jangka panjang yang nyata dari investasi besar ini sebagian besar tetap tidak terukur dan tidak diketahui. Praktik evaluasi yang dominan saat ini cenderung bersifat jangka pendek dan berfokus pada luaran (outputs) seperti jumlah peserta atau tingkat kepuasan, bukan pada hasil (outcomes) dan dampak (impact) transformatif yang berkelanjutan. Kesenjangan pengukuran ini menghambat pembelajaran strategis dan pembuktian nilai sejati PkM. Menjawab tantangan fundamental tersebut, artikel konseptual ini bertujuan untuk merumuskan dan mengelaborasi sebuah kerangka kerja teoretis yang komprehensif untuk pengukuran dampak sosial jangka panjang dari program PkM. Metode yang digunakan adalah perancangan model konseptual melalui sintesis literatur dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teori evaluasi program, studi pembangunan, dan manajemen dampak sosial. Hasilnya adalah sebuah kerangka kerja holistik bernama "KERIS PkM" (Kerangka Evaluasi Reflektif & Impak Sosial Pengabdian kepada Masyarakat). Kerangka ini dibangun di atas empat komponen utama: (1) Landasan filosofis yang partisipatif dan berorientasi pada pembelajaran; (2) Kewajiban perumusan Teori Perubahan (Theory of Change) sebagai fondasi logis setiap program; (3) Lima Dimensi Dampak Holistik (Kapasitas Manusia, Modal Sosial, Ekonomi Lokal, Keberlanjutan Ekologis, dan Kelembagaan Komunitas) sebagai lensa analisis; dan (4) Perangkat Pengukuran Metode Gabungan (Mixed-Methods) yang diaplikasikan secara longitudinal. Disimpulkan bahwa adopsi KERIS PkM dapat memfasiliasi pergeseran paradigma fundamental dalam ekosistem PkM Indonesia, dari budaya pelaporan aktivitas menjadi budaya pembuktian dampak, pembelajaran berkelanjutan, dan pertanggungjawaban sosial yang otentik.

© 2025 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Setiap tahunnya, ribuan dosen dan mahasiswa dari ratusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia turun ke masyarakat, melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Jika diakumulasikan, PkM merepresentasikan sebuah investasi nasional yang masif, baik dalam hal pendanaan publik

dan institusional, maupun dalam curahan waktu, tenaga, dan intelektualitas sumber daya manusia terbaik bangsa. Program-program ini, mulai dari pemberdayaan UMKM, pendampingan desa wisata, hingga edukasi kesehatan, secara teoretis bertujuan untuk menjadi katalisator perubahan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun, di tengah masifnya aktivitas tersebut, terdapat sebuah "ruang gelap" akuntabilitas yang mengkhawatirkan. Bagaimana kita mengetahui dampak nyata dari semua upaya ini? Apa yang sesungguhnya berubah dalam kehidupan masyarakat setahun, tiga tahun, atau lima tahun setelah sebuah program PkM selesai? Sayangnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan krusial ini seringkali kabur. Praktik evaluasi PkM yang dominan saat ini terjebak dalam paradigma jangka pendek dan pengukuran yang dangkal. Keberhasilan seringkali diukur melalui indikator-indikator aktivitas atau luaran (*outputs*), seperti jumlah peserta pelatihan, jumlah media massa yang meliput, tingkat kepuasan mitra yang diukur melalui kuesioner sesaat, atau jumlah publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan oleh dosen (Suroso & Priyono, 2024). Metrik-metrik ini, meskipun penting untuk pelaporan administratif, sama sekali tidak menangkap esensi dari perubahan sosial. Mereka adalah "metrik kesibukan" (*vanity metrics*), bukan "metrik dampak". Mereka memberitahu kita seberapa sibuk tim PkM, tetapi tidak memberitahu kita apakah ada kehidupan yang benar-benar membaik secara berkelanjutan. Kesenjangan antara aktivitas yang dilaporkan dan dampak yang dibuktikan ini menciptakan sebuah krisis legitimasi. Tanpa pengukuran dampak jangka panjang yang kredibel, PkM berisiko dianggap sebagai ritual akademis yang menghabiskan sumber daya tanpa pertanggungjawaban sosial yang jelas, dan perguruan tinggi kehilangan kesempatan emas untuk belajar secara sistematis tentang intervensi apa yang benar-benar berhasil dan mengapa.

Untuk keluar dari jebakan ini, diperlukan sebuah pergeseran paradigma fundamental: dari sekadar memonitor *output* menuju evaluasi *outcomes* (hasil jangka menengah) dan *impact* (dampak jangka panjang). Diperlukan sebuah kerangka kerja yang mampu memandu para perencana dan pelaksana PkM untuk berpikir, merancang, dan mengukur jejak perubahan yang mereka tinggalkan di masyarakat. Oleh karena itu, artikel konseptual ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Tulisan ini akan merumuskan sebuah kerangka kerja teoretis yang komprehensif, sistematis, dan dapat diterapkan untuk mengukur dampak sosial jangka panjang dari program-program PkM yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Artikel ini merupakan sebuah penelitian konseptual yang bertujuan untuk membangun model. Metode yang digunakan adalah perancangan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework design*) melalui pendekatan sintesis literatur yang interdisipliner. Proses perancangan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris primer, melainkan membangun sebuah model baru dari fondasi teori-teori dan praktik-praktik terbaik yang sudah ada. Proses ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama:

Pertama yaitu tahap diagnosis dan kritik, tahap awal ini melibatkan analisis kritis terhadap praktik evaluasi PkM yang ada di Indonesia. Ini dilakukan dengan meninjau artikel-artikel ilmiah tentang PkM, panduan-panduan hibah, dan format laporan PkM dari berbagai perguruan tinggi untuk mengidentifikasi pola, kekuatan, dan terutama, kelemahan sistemik dalam pendekatan evaluasi yang dominan saat ini. Kedua tahap sintesis literatur, tahap ini adalah inti dari proses pengembangan model. Dilakukan peninjauan literatur yang ekstensif terhadap berbagai kerangka kerja evaluasi program

yang telah mapan secara global. Fokus utama adalah pada: (a) Model Logika Program, seperti *Logic Models* dan Teori Perubahan (Theory of Change/ToC) (Weiss, 1995; Vogel, 2012); (b) Pendekatan Pengukuran Dampak Sosial, terutama Social Return on Investment (SROI) (Nicholls et al., 2012); (c) Metodologi Evaluasi Partisipatif dan Kualitatif, seperti teknik Most Significant Change (MSC) (Davies & Dart, 2005); dan (d) Teori-teori Pembangunan, seperti konsep Modal Sosial (Putnam, 2000). Ketiga, tahap perancangan dan kontekstualisasi, pada tahap akhir, konsep-konsep kunci dari berbagai teori tersebut disintesis, diadaptasi, dan diintegrasikan menjadi sebuah kerangka kerja baru yang koheren. Kerangka kerja ini secara khusus dikontekstualisasikan agar relevan dengan karakteristik program PkM perguruan tinggi di Indonesia, yang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya namun kaya akan potensi intelektual. Hasilnya adalah sebuah model yang tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga dirancang agar dapat diterapkan secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai jawaban atas tantangan yang telah diuraikan, artikel ini mengajukan sebuah kerangka kerja komprehensif bernama "KERIS PkM" (Kerangka Evaluasi Reflektif & Impak Sosial Pengabdian kepada Masyarakat). Nama "KERIS" dipilih untuk merepresentasikan sebuah "alat" yang tajam dan presisi untuk "membelah" kompleksitas dampak sosial, serta sebagai akronim yang mencerminkan esensinya. KERIS PkM dibangun di atas landasan filosofis, dan terdiri dari empat komponen utama yang tak terpisahkan.

Landasan Filosofis Kerangka Kerja: Empat Prinsip Utama

Sebelum masuk ke teknis pengukuran, KERIS PkM didasari oleh empat prinsip filosofis yang mengubah cara pandang terhadap evaluasi: (1) Partisipatif: Evaluasi bukan lagi aktivitas eksternal yang dilakukan oleh akademisi *terhadap* masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sebagai mitra dilibatkan secara aktif dalam mendefinisikan keberhasilan, mengumpulkan data, dan memaknai perubahan. (2) Metode Gabungan (Mixed-Methods): Kerangka ini menolak dikotomi antara data kuantitatif dan kualitatif. Ia secara sadar mengintegrasikan angka dan narasi, data statistik dan cerita perubahan, untuk mendapatkan gambaran dampak yang kaya dan holistik (Creswell & Plano Clark, 2018). (3) Longitudinal: Dampak sosial sejati membutuhkan waktu untuk bersemi. Oleh karena itu, pengukuran tidak dilakukan hanya sekali di akhir program, melainkan secara berkala dalam rentang waktu yang panjang (misalnya 1, 3, hingga 5 tahun pasca-intervensi). (4) Berorientasi pada Pembelajaran: Tujuan utama evaluasi dalam kerangka ini bukanlah untuk menghakimi (gagal atau berhasil), melainkan untuk belajar. Temuan evaluasi menjadi umpan balik strategis bagi perguruan tinggi untuk terus memperbaiki desain dan implementasi program PkM di masa depan, sebuah pendekatan yang sejalan dengan konsep *Developmental Evaluation* (Patton, 2019).

Tahap Fondasi: Membangun Teori Perubahan (Theory of Change) sebagai Peta Jalan Dampak

KERIS PkM mewajibkan setiap program PkM, sebelum dimulai, untuk merumuskan secara eksplisit Teori Perubahan (Theory of Change - ToC)-nya. ToC adalah narasi kausal yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah perubahan yang diinginkan akan terjadi dalam konteks tertentu. Ia adalah "peta jalan dampak" yang menghubungkan antara *input* (sumber daya yang dimiliki), *aktivitas* (apa yang dilakukan), *output* (hasil langsung dari aktivitas), *outcomes* (perubahan perilaku, pengetahuan, atau kondisi dalam jangka menengah), dan *impact* (perubahan fundamental di tingkat sistem

atau komunitas dalam jangka panjang). Misalnya, dalam program pendampingan UMKM, ToC akan menjelaskan secara logis bagaimana aktivitas "pelatihan pemasaran digital" (*aktivitas*) akan menghasilkan "UMKM memiliki akun media sosial" (*output*), yang kemudian diharapkan akan mengubah "perilaku pemasaran UMKM menjadi lebih aktif secara online" (*outcome*), dan pada akhirnya berkontribusi pada "peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi UMKM" (*impact*). Dengan adanya ToC, evaluasi menjadi lebih terarah karena ia tidak lagi sekadar mengukur aktivitas, melainkan menguji asumsi-asumsi yang ada di sepanjang jalur kausal menuju dampak.

Dimensi Dampak: Lensa Holistik PkM Berkelanjutan

KERIS PkM menolak pandangan unidimensional terhadap dampak (misalnya, hanya dampak ekonomi). Kerangka ini mengusulkan analisis dampak melalui lima dimensi holistik yang saling terkait, yang secara kolektif merepresentasikan kesejahteraan komunitas yang berkelanjutan: (1) Dimensi Kapasitas Manusia: Mengukur perubahan pada tingkat individu, meliputi peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap atau aspirasi (*attitude*). Apakah peserta pelatihan benar-benar mampu menerapkan keterampilannya setahun kemudian?. (2) Dimensi Modal Sosial: Mengukur perubahan dalam hubungan antar-individu dan antar-kelompok di komunitas. Apakah program PkM berhasil memperkuat jejaring kerja sama, meningkatkan rasa saling percaya, dan menumbuhkan norma gotong royong? Ini adalah "lem" yang merekatkan masyarakat dan menjadi fondasi resiliensi (Putnam, 2000). (3) Dimensi Ekonomi Lokal: Mengukur dampak nyata pada tingkat ekonomi rumah tangga dan komunitas, seperti peningkatan pendapatan, munculnya wirausaha baru, terbukanya lapangan kerja, atau meningkatnya akses terhadap pasar. (4) Dimensi Keberlanjutan Ekologis: Mengukur dampak program terhadap lingkungan fisik. Apakah program PkM (misalnya, tentang pengelolaan sampah atau pertanian organik) berhasil mendorong praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas sumber daya alam lokal?. (5) Dimensi Kelembagaan Komunitas: Mengukur penguatan kapasitas organisasi lokal, seperti BUMDes, kelompok tani, atau Pokdarwis. Apakah program PkM berhasil meningkatkan kemampuan manajerial, transparansi, dan kemandirian lembaga-lembaga ini untuk melanjutkan pembangunan setelah universitas menarik diri?

Perangkat Pengukuran dan Lini Masa Evaluasi: Memetakan Perubahan Lintas Waktu

Untuk dapat mengukur kelima dimensi dampak yang kompleks tersebut secara efektif, Kerangka Kerja KERIS PkM menerapkan sebuah pendekatan yang memadukan keragaman perangkat pengukuran dengan penerapan lini masa evaluasi yang strategis dan membentang jauh ke depan. Pendekatan ini menolak ketergantungan pada satu alat ukur tunggal, dan sebaliknya, mengadopsi sebuah "kotak peralatan" metode gabungan (*mixed-methods*) yang memungkinkan triangulasi data untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan valid. Fondasi kuantitatif dari kerangka kerja ini adalah penggunaan survei yang dirancang dengan cermat, yang tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dalam tiga tahap: *pre-test* sebelum program dimulai untuk menetapkan data dasar, *post-test* segera setelah program berakhir untuk mengukur perubahan langsung, dan survei *follow-up* satu hingga tiga tahun kemudian untuk melacak retensi pengetahuan dan keberlanjutan perilaku. Namun, untuk menangkap kedalaman narasi perubahan yang seringkali luput dari angka, kerangka ini mengintegrasikan beberapa teknik kualitatif yang kuat. Salah satunya adalah metode Most Significant Change (MSC), sebuah teknik partisipatif di mana anggota komunitas sendiri yang mengidentifikasi dan memilih cerita-cerita perubahan yang paling berarti bagi mereka. Metode ini sangat ampuh dalam mengungkap dampak-dampak tak terduga dan memahami "apa yang sesungguhnya bernilai" dari sudut pandang mitra.

Untuk melengkapinya, kerangka ini juga merekomendasikan analisis Social Return on Investment (SROI), sebuah pendekatan inovatif untuk mengkuantifikasi dan memonetisasi nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan, yang kemudian dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan. Akhirnya, studi kasus mendalam terhadap beberapa individu atau kelompok dapat digunakan untuk menyajikan potret perubahan yang utuh, kontekstual, dan menyentuh secara manusiawi.

Lebih dari sekadar "apa" yang diukur, kerangka kerja ini sangat menekankan "kapan" pengukuran itu dilakukan. KERIS PkM secara tegas mewajibkan sebuah desain evaluasi longitudinal yang melampaui siklus proyek yang pendek. Perjalanan pengukuran ini dimulai pada titik T0, atau *baseline*, sebelum program diimplementasikan, yang berfungsi untuk memotret kondisi awal secara akurat sehingga perubahan dapat diatribusikan dengan lebih percaya diri. Tahap berikutnya adalah pada T1, yakni segera setelah program berakhir, di mana pengukuran difokuskan pada luaran (*outputs*) dan hasil jangka pendek (*short-term outcomes*), seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan sesaat. Evaluasi yang sesungguhnya untuk melihat keberlanjutan baru dimulai pada T2, yang dijadwalkan satu hingga dua tahun pasca-program. Pada titik ini, fokusnya adalah untuk melihat apakah perilaku baru telah diadopsi secara mandiri dan apakah hasil jangka menengah (*medium-term outcomes*) mulai terlihat. Puncak dari evaluasi dampak adalah pada T3, antara tiga hingga lima tahun setelah intervensi berakhir. Pengukuran pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang (*long-term impact*) yang sesungguhnya, seperti perubahan sistemik di tingkat komunitas atau pelembagaan inovasi yang diperkenalkan. Dengan lini masa yang terstruktur ini, evaluasi bertransformasi dari sebuah "otopsi" di akhir proyek menjadi sebuah proses pembelajaran dan penemuan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka Kerja Evaluasi Reflektif & Impak Sosial (KERIS) PkM yang diusulkan dalam artikel ini menawarkan sebuah solusi yang sistematis dan berbasis teori untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan berpijak pada landasan filosofis yang partisipatif dan berorientasi pada pembelajaran, serta mengintegrasikan komponen-komponen kuat seperti teori Perubahan, analisis dampak multidimensional, dan perangkat pengukuran metode gabungan yang longitudinal, KERIS PkM menyediakan sebuah peta jalan yang jelas. Adopsi kerangka kerja ini lebih dari sekadar perubahan teknis dalam metode evaluasi. Ia menuntut dan sekaligus memfasilitasi sebuah pergeseran budaya yang fundamental di dalam perguruan tinggi: dari budaya pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan aktivitas, menuju budaya refleksi kritis, pembelajaran berkelanjutan, dan pertanggungjawaban sosial yang otentik.

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak (1) LPPM, yaitu Mewajibkan Teori Perubahan (ToC), Mengembangkan Proyek Percontohan (Pilot Project), Membangun Kapasitas Evaluator. (2) Kemendikbudristek, BRIN, dll, yaitu mengubah skema pendanaan, dan merevisi indikator kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Davies, R., & Dart, J. (2005). *The 'Most Significant Change' (MSC) Technique: A Guide to Its Use*.

- Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed, T. (2012). *A guide to social return on investment*. The SROI Network.
- Patton, M. Q. (2019). *Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use*. Guilford Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Suroso, A., & Priyono, E. A. (2024). Dari Aktivitas ke Dampak: Evaluasi Kritis terhadap Praktik Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pembangunan*, 12(1), 1–15.
- Vogel, I. (2012). *Review of the use of 'Theory of Change' in international development*. UK Department for International Development.
- Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In *New approaches to evaluating community initiatives* (Vol. 1, pp. 65–92). Aspen Institute.